

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H. (2010). *Hukum Siber (Cyber Law)*. Restu Agung.
- Ansori, L. (2017). *Hukum Pidana Siber (Cyber Crime)*. Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2016). *Segi-Segi Hukum Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)*. Alumni.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Ahmadi, A., & Widodo, S. (2013). Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Asril Sitompul. (2004). Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung: PT Aditya Bakti.
- Abdi, Yuyung. 2019. *Prostitusi: Kisah 60 Daerah Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Alfitra, Afwan Faizin and Ali Mansur. *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia*. Jakarta: Wade Group, 2021.
- Barda Nawawi Arief, 2002, Perbandingan Hukum Pidna, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Hijriani, S.H., M.H. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Jakarta, 2021.
- Kansil, C. T. S. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Kartono, K. 2003. *Patologi Sosial*. Edisi 11. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press
- Makmur, Syafrudin. *Kemahiran Hukum*. Bogor: Staini Press, 2021.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Simanjuntak, B., *Beberapa Aspek Patologi Sosial* (Bandung: Offset Alumni, 2021)
- Soedjono D. (2021). *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Jakarta: Karya Nusantara.
- Sutarman. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.
- Sunarto, 'Peranan Polisi Dalam Mengantisipasi Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar (Studi Pada Polda Metro Jaya)' (Universitas Indonesia, 2017).
- Suhail Almerdar, *The Criminalisation of Identity Theft under the Saudi Anti-Cybercrime Law 2007*, *Journal of International Commercial Law and Technology* Vol.9, No.2 (2014)
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

Jurnal Ilmiah

Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta, Reimon Supusepa,
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi
Online Melalui Aplikasi Michat. (Pattimura Legal Journal, 1(1) 2022

Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta,
jurnal S1 Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Yogyakarta. Diakses pada 4 Juni 2025. Pukul 15.00 WIB

Eriyantouw Wahid, 'Sanksi Bagi Pemakai Jasa Prostitusi Online', Hukum
Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1.2 (2019)

Irma Febrianty Chalid & Hardianto Djanggih, 2021, Tinjauan Kriminologi
Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus
Aplikasi Mi Chat)

Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang
(legisprudence), Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Rizky Karo Karo, Debora Pasaribu, Elsyia Sulimin, "Upaya Preventif Dan
Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia", (Surabaya : Lex
Journal Kajian Hukum Dan Keadilan).

Rujukan Lain

<https://kbbi.web.id/preventif> diakses pada Sabtu, 21 Juni 2025. Pukul
23.00 WIB

<https://www.michat.sg/id> diakses pada

<https://metodeku.com/pengertian-aplikasi-michat/>, diakses pada

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.p
df](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.pdf) diakses pada

Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Keputusan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2008
- UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik